

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHUN 2020 DI DESA BITEFA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Igniossa Kenjam¹, Aplonia Palla², Marthen Patiung³

Universitas Timor, Kefamenanu, ignikenjam085@gmail.com

Universitas Timor, Kefamanu, aploniamonteiro@yahoo.co.id.

Universitas Timor, Kefamenanu, marthenpatiung@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Masyarakat Bitefa. Fokus penelitian ini adalah faktor komunikasi, sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan, disposisi, srtuktur birokrasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, proses komunikasi sudah berjalan cukup baik yang ditandai dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa kepada masyarakat sebelum melakukan pembagian dengan menjelaskan pengelolaan dan pemanfaatan dana BLT dan komunikasi tersebut juga cukup berdampak baik bagi masyarakat penerima bantuan tersebut. Kedua, sumber daya sudah disediakan dalam pelaksanaan program BLT dan sudah berjalan dengan baik. Ketiga, proses pelaksanaan pembagian BLT belum terlalu maksimal karena masih terjadi simpang siur karena data yang diberikan dari desa kemudian tidak diteliti dengan baik, sehingga terjadi pengulangan nama yang menyebabkan ada keluarga yang dianggap mampu kemudian direkomendasikan untuk menerima bantuan tersebut sedangkan tujuan dari bantuan tersebut harusnya diterima oleh para janda atau keluarga miskin. Keempat, struktur birokrasi dalam program BLT sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dari kementerian sosial hingga kebijakan yang telah ditetapkan di desa lewat musyawarah desa.

Kata kunci: Implementasi; Program Bantuan Langsung Tunai

ABSTRACT

The aim of this research is to describe and analyze the implementation of the Bantuan Langsung Tunai (BLT) program for the Bitefa Community. The focus of this research is communication factors, human resources, budget, facilities, information and authority, disposition, bureaucratic structure. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is qualitative descriptive data analysis. The research results show that firstly, the communication process has gone quite well, marked by outreach activities carried out by village government officials to the community before making the distribution by explaining the management and use of BLT funds and this communication also has quite a good impact on the community receiving the assistance. Second, resources have been provided for the implementation of the BLT program and it is running well. Third, the process of implementing the distribution of BLT has not been optimal because there is still confusion because the data provided from the village is not properly researched, resulting in repetition of names which causes families who are considered capable to be recommended to receive the assistance, even though the aim

of the assistance is to receive it. by widows or poor families. Fourth, the bureaucratic structure in the BLT program has been running in accordance with procedures established by the Ministry of Social Affairs and policies that have been established in the village through village meetings.

Keywords: Implementation; Bantuan Langsung Tunai Program

PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat konstitusi, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan, merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dasar hukum pelaksanaan program adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Rumah Tangga miskin. Pelaksanaan program pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin sebagai kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau *cash transfer* adalah subsidi yang diberikan langsung kepada masyarakat miskin berupa uang tunai. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin sebagai cara untuk mengatasi harga pangan yang melonjak. Bantuan Langsung Tunai dilatarbelakangi sebagai upaya mempertahankan tingkat konsumsi rumah tangga miskin sebagai akibat adanya kebijakan kenaikan harga BBM. Tujuan BLT adalah membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), harga-harga ekonomi dalam negeri kini sedang anjlok, tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Iklim perekonomian saat ini akan berdampak pada berbagai sektor perusahaan, sehingga

berdampak pada terjadinya PHK dan menurunnya penyerapan tenaga kerja jika tidak ditangani. Ketidakstabilan sosial kemungkinan besar akan terjadi jika keadaan ini tidak diantisipasi dengan baik. Seiring berjalannya waktu, akan terjadi peningkatan kesenjangan regional dan perkotaan-pedesaan, kesenjangan pendapatan yang semakin lebar, dan dampaknya terhadap kemiskinan antargenerasi. Perekonomian pedesaan merupakan salah satu dari sekian banyak aspek perekonomian wilayah Timor Tengah Utara (TTU) yang mengalami tekanan akibat kenaikan harga-harga ekonomi. Masyarakat perkotaan saat ini sudah lebih menyadarinya. Namun, peningkatan biaya ekonomi juga dapat menyebar ke desa-desa karena pekerja musiman mempunyai tingkat mobilitas yang tinggi, bepergian dari desa ke kota dan kembali lagi. Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi kondisi ekonomi di tingkat rumah tangga dan desa. Saat ini stabilitas sistem keuangan masih belum memadai. Alat-alat baru ditawarkan untuk mengurangi dampak terhadap perekonomian desa sebagai respons terhadap risiko terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Sasaran program dapat ditetapkan dengan menggunakan metode penetapan sasaran berbasis komunitas dengan mengedepankan musyawarah dan mendorong kearifan lokal desa. Bantuan Langsung Tunai menggunakan dana desa (BLT) dapat segera diterapkan dengan penerima manfaat lebih banyak dari penerima manfaat program nasional guna meminimalkan potensi konflik di desa. Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak ekonomi di tingkat rumah tangga dan desa. Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang

prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 ditetapkan. Ketentuan pasal 21 ayat (1) PP 22 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 60 tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PP 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PP 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas. Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak ekonomi terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi penduduk miskin di desa. Dengan adanya pasal dan penjelasannya tersebut, perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat dan menekan “jebakan moral” (moral hazard) seminimal mungkin.

Kriteria Target Prioritas Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) direkomendasikan menggunakan pendekatan komunitas sesuai dengan kearifan lokal,

pemerintah perlu mengarahkan prioritas penerima manfaat program tersebut dan termasuklah di Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Miomaffo Timur terkhususnya di Desa Bitefa, diharapkan setiap masyarakat desa Bitefa memperoleh Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Jumlah rumah tangga yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 90 Kepala Keluarga. Beberapa kriteria penerima manfaat yang menjadi prioritas antara lain: warga lanjut usia (lansia) miskin dan rumah tangga yang kurang mampu, rumah tangga yang terdaftar sebagai penerima bantuan di tingkat desa yang belum terjangkau oleh program nasional atau daerah, seperti rumah tangga penerima zakat, rumah tangga dengan pencari nafkah utama yang tidak dapat bekerja atau penghasilannya sangat minim, rumah tangga yang tidak dapat membeli atau mengakses kebutuhan dasar, terutama makanan, karena keadaan ekonomi yang kurang memadai, dan rumah tangga yang menurut komunitas setempat direkomendasikan untuk menerima manfaat program sesuai dengan kesepakatan dan kearifan lokal.

Namun, sejak program ini diluncurkan, telah mengundang pro dan kontra. Berbagai sisi dari program ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Disini penulis menemukan beberapa masalah diantaranya implementasi kebijakan dan respon masyarakat terhadap Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilihat dari segi penyalurannya dilapangan kurang efektif. Berbicara tentang efektifitas sebagai orientasi kerja berarti yang menjadi pusat perhatian adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah digunakan harus ditentukan sebelumnya dan dengan memanfaatkan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai dalam waktu yang telah ditetapkan pula. Untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Di Kabupaten Timor Tengah Utara tepatnya di desa Bitefa Kecamatan Miomaffo Timur, pelaksanaan Bantuan langsung Tunai (BLT) masih menjadi suatu dilema. Tidak tepatnya sasaran pembagian menyebabkan warga masyarakat Bitefa yang berhak justru tidak mendapat BLT. Demikian sebaliknya, mereka yang sudah berkecukupan justru mendapatkan BLT. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dibagikan kepada masyarakat Bitefa yang dikategorikan sebagai Warga Lanjut Usia (Lansia), yang belum sama sekali menerima bantuan program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja. Cara rekrutmen penerima Bantuan langsung Tunai (BLT) yang di terapkan di desa Bitefa dengan cara dari pihak aparat pemerinta desa Bitefa yang turun langsung ke masyarakat untuk merekrut penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan aparat pemeritah desa Bitefa menghimbau kepada masyarakat yang tergolong dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar melengkapi beberapa persyaratan untuk di bawah ke kantor desa antara lain : Kartu Tanda Penduduk(KTP) Asli dan Foto Kopi Kartu Keluarga (KK)

Aparat pemerintah desa Bitefa membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada setiap Warga Lanjut Usia (Lansia) dan rumah tangga miskin, pada tahap pertama (I) dengan jumlah Rp. 600.000 /bulan sejak bulan April. Setelah berjalannya waktu pada tahap kedua (II) mulai bulan September hingga pada saat ini setiap Warga Lanjut Usia (Lansia) dan bagi keluarga yang kurang mampu hanya menerima Rp.300.000 /bulan. Kemungkinan besar bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan juga tidak sesuai dengan kebutuhan yang mereka keluarkan setiap harinya.

Kriteria penerima BLT di desa Bitefa Kecamatan Miomaffo Timur Kab.Timor Tengah Utara:

1. Warga lanjut usia (lansia) miskin dan rumah tangga yang kurang mampu
2. Rumah tangga yang terdaftar sebagai penerima bantuan di tingkat desa yang belum terjangkau oleh program nasional

atau daerah, seperti rumah tangga penerima zakat

3. Rumah tangga dengan pencari nafkah utama yang tidak dapat bekerja atau penghasilannya sangat minim
4. Rumah tangga yang tidak dapat membeli atau mengakses kebutuhan dasar, terutama makanan, karena keadaan ekonomi yang kurang memadai
5. Rumah tangga yang menurut komunitas setempat direkomendasikan untuk menerima manfaat program sesuai dengan kesepakatan dan kearifan lokal

Dari uraian di atas, maka ruusan masalah penelitian adalah bagaimana implementasi program bantuan langsung tunai di desa Bitefa. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana implementasi program bantuan langsung tunai di desa Bitefa.

TINJAUN PUSTAKA

Dalam mendeskripsikan masalah yang diaparkan di atas maka dapat digunakan teori-teori berikut ini yakni;

1. Konsep Implementasi

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Mazmanian dan Sebastiar (2001) dalam (Wahab, 2001:68) mendefinisikan implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Mazmanian dan Sebastier, implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, yang berbentuk undang-

undang dan juga bisa berbentuk perintah atau keputusan–keputusan yang penting.

Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang–undang, kemudian outputnya adalah kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Implementasi bisa juga dianggap suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*.

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (2002) dalam (Harsono (2002:67) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjaditindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu Program.

Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh Hanifah Harsono, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir. Oleh karena itu suatu implementasi baik diharapkan dalam setiap program untuk terciptanya tujuan yang diharapkan. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.

Menurut Majone dan Wildavsky (2004) dalam (Nurdin dan Usman, (2004:70) mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Schubert (2002) dalam (Nurdin dan Usman (2002:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung

arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh–sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pengertian implementasi menurut Kamus Besar Indonesia, implementasi juga berarti penerapan atau pelaksanaan jadi, implementasi adalah tindakan untuk menjalankan rencana telah dibuat. Dengan demikian, implementasi hanya dapat dilakukan jika terdapat sebuah rencana. Hasil implementasi akan maksimal jika penerapan dilakukan sesuai rencana sebelumnya. Akhirnya implementasi bermuara pada sistem atau mekanisme.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perluasan dari aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan serta tindakan dengan tujuan untuk menggapainya juga di perlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif serta mewujudkan nilai moral yang terkandung dalam pancasila sebagai norma etik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1) Model Implementasi

Model implementasi George C. Edward III memiliki 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu ;

a. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal–hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup

beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Ini diartikan bahwa, bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimana pun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut. Bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan

implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang mempunyai kehandalan, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan tersebut, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4. Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operation Procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Dalam bukunya *Public Policy*, Riant Nugroho (2014:665-678) menambahkan, ada beberapa model dan pendekatan implementasi kebijakan, yaitu.

1. Model Van Meter dan Van Horn

Model pertama adalah model klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Duet Donald Van Meter dan Carl. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara liner dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel:

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antara organisasi,
- b. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor,
- c. Kondisi ekonomi, sosial dan politi,
- d. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana / implementor.

2. Model Mazmanian dan Sebatier

Model kedua adalah model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan

keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sebatier disebut sebagai model Kerangka Analisis Implementasi (*A Framework for Implementation Analysis*). Model Mazmanian Sebatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel. Pertama, variabel independen, yaitu mudak tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumberdana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. Ketiga variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

2. Konsep Program

1) Pengertian Program

Program adalah sebuah instruksi tertulis yang di buat oleh sang programer yang sebuah program itu ditulis dalam sebuah bagian executable dalam sebuah software. Itu menjadi sebuah pengertian secara umum tentang program namun tentunya pengertian singkat itu menjadi hal yang kurang untuk pembaca. Menurut Yulikupastono (2009:9), Program sekumpulan/ pernyataan yang berhubungan dengan komputer dan Menurut Eme Utami (2009), program adalah sebuah

bahasa rencana untuk membuat sebuah hal tentunya menjadi sebuah hal yang menjadi baik, sedangkan Menurut Sugiyono (2005:21), program adalah sebuah rangkaian yang menggunakan bahasa komputer yang disusun yang secara logis dan sistematis, begitu juga Menurut Anwar Harjono (2017), program adalah sebuah urutan intruksi untuk menjalankan suatu komputasi yang akan menjadi sebuah bentuk perbaikan dalam sebuah hal, dan Menurut Saifudin Anshari (2017), program adalah sebuah daftar terperinci mengenai susunan acara atau usaha yang akan di laksanakan dan menjadi sebuah harapan untuk sukses yang menjadi hasil dalam langkah, begitu juga Menurut Sunarto (2005), program adalah sekumpulan intruksi yang akan di wujudkan dalam bentuk bahasa, kode skema yang akan menjadi sebuah langkah untuk menjadi sebuah perubahan atau perbaikan sebuah masalah.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa program adalah sebuah susunan rencana yang dibuat untuk dilaksanakan atau diterapkan agar suatu masalah yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik dan benar.

2) Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan langsung tunai (BLT) adalah Program yang diselenggarakan dalam kerangka kebijakan perlindungan sosial sebagai dampak subsidi bahan bakar minyak (BBM). Mekanisme yang dilakukan merupakan asistensi sosial yang melayani untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dapat mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, dan meningkatkan tanggung jawab sosial bersama (Departemen Komunikasi dan Informasi RI) dan kenyataan bahwa subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah selama ini cenderung lebih dinikmati oleh kalangan menengah ke atas oleh kelompok miskin. Bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat mi skin. BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, tetap pada

tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT membantu sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik. Penerima bantuan langsung tunai adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang termasuk Rumah Tangga Sangat Miskin (termiskin), Rumah Tangga Miskin (miskin) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (hampir miskin) di seluruh wilayah Indonesia. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan yang dijalankan dalam program BLT yang berbeda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut. Indonesia juga merupakan penyelenggara negara BLT, dengan imbalan berupa pemberian kompensasi, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan.

Menurut Winandin Imawan (2008), program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang di laksanakan pemerintah indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program bantuan langsung tunai (BLT) masuk dalam klaster I yaitu program bantuan dan perlindungan sosial. Termasuk dalam klaster I adalah program beras miskin atau raskin, program keluarga harapan (PKH), program jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS) dan program beasiswa.

Menurut Winandin Imawan (2008), selain melaksanakan klaster I pemerintah indonesia juga melaksanakan program pengentasan kemiskinan lainnya yang termasuk dalam klaster II yaitu program pemberdayaan masyarakat (PNPM). Termasuk klaster II ini adalah PNPM pedesaan (PPK), PNPM perkotaan (P2KP),

PNPM infrastruktur pedesaan (PIIP), PNPM kelautan (PEMP), dan PNPM agribisnis (PUAP).

Pelaksanaan klaster III yaitu program pemberdayaan usaha menengah kecil (UMK), termasuk di dalamnya adalah program kredit UMKM dan program kredit usaha rakyat (KUR).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah dekriptif kualitatif dengan lokus penelitian adalah Desa Bitefa. Adapun fokus penelitian ini adalah: implementasi program BLT di desa tersebut. Dalam mengumpulkan data, kami mengumpulkan dengan cara mewawancarai responden yang memiliki hubungan langsung dengan program tersebut. Adapun responden tersebut adalah Kepala desa, Aparat pemerintah desa, Warga masyarakat penerima BLT, dan Dokumen. Setelah data dikumpulkan, data dianalisa untuk menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Proses komunikasi sudah berjalan cukup baik tetapi disini peneliti menyadari bahwa komunikasi yang dilakukan antara aparat pemerintah desa dan masyarakat Bitefa dalam proses penerapan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih cenderung terlihat minim dan kurangnya pemahaman dari aparat pemerintah desa Bitefa dalam berkomunikasi yang baik dengan masyarakat, sehingga menyebabkan dalam proses pemerataan ekonomi, sosial dan politik masih terlihat tidak merata.

Menurut Aristoteles (Ruben,2002:21) komunikasi adalah alat dimana warga masyarakat dapat berpartisipasi dalam demokrasi.

Selanjutnya menurut Anderson mengatakan bahwa komunikasi merupakan proses yang dinamis secara konstan berubah sesuai dengan situasi yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa proses komunikasi sudah berjalan cukup baik yang ditandai dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan

oleh aparat pemerintah desa kepada masyarakat sebelum melakukan pembagian dengan menjelaskan pengelolaan dan pemanfaatan dana BLT dan komunikasi tersebut juga cukup berdampak baik oleh masyarakat penerima bantuan tersebut.

Sumber daya

Sumber daya yang disiapkan dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah disediakan oleh aparat pemerintah desa Bitefa. Sumber daya adalah suatu nilai atau potensi yang dimiliki oleh suatu menteri atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya atau (*resources*) berkenaan langsung dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan khususnya pada proses pengelolaan dan pembagian bantuan langsung tunai yang dilaksanakan di desa Bitefa.

Sumber daya menurut (Hasibuan, 2016) sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Selanjutnya Badriyah (2015) berpendapat bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya sudah disediakan dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan berjalan dengan baik.

Disposisi

Proses pelaksanaan pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) sudah dilaksanakan sesuai disposisi pemerintah atau aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Disposisi adalah pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat dinas, yang langsung dituliskan pada

surat yang bersangkutan atau pada lembar khusus.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan pembagian BLT (bantuan Langsung Tunai) belum terlalu maksimal karena masih terjadi simpang siur karena data yang diberikan dari desa kemudian tidak diteliti dengan baik, sehingga terjadi pengulangan nama yang menyebabkan ada keluarga yang dianggap mampu kemudian direkomendasikan untuk menerima bantuan tersebut sedangkan tujuan dari bantuan tersebut harusnya diterima oleh para janda atau keluarga miskin.

Struktur Birokrasi

Struktur berkenaan langsung dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggaraan implementasi kebijakan publik. Struktur organisasi yang menjadi signifikan terhadap implementasi kebijakan. Seperti yang dikemukakan George Edwards III bahwa struktur birokrasi juga memiliki peran penting dalam implementasi, maka penulis melihat struktur birokrasi dalam proses penerimaan bantuan langsung tunai sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan kementerian sosial (Kemensos) dalam musyawarah desa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart operational prodesure (SOP)* aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang panjang terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, selanjutnya mengakibatkan aktivitas birokrasi menjadi tidak fleksibel.

Berdasarkan hasil peneliti menyimpulkan bahwa stuktur birokrasi

dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dari kementerian sosial (Kemensos) hingga kebijakan yang telah ditetapkan di desa lewat musyawarah desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses komunikasi sudah berjalan cukup baik yang ditandai dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa kepada masyarakat sebelum melakukan pembagian dengan menjelaskan pengelolaan dan pemanfaatan dana BLT dan komunikasi tersebut juga cukup berdampak baik bagi masyarakat penerima bantuan tersebut
2. Sumber daya sudah disediakan dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sudah berjalan dengan baik.
3. Proses pelaksanaan pembagian BLT (bantuan Langsung Tunai) belum terlalu maksimal karena masih terjadi simpang siur karena data yang diberikan dari desa kemudian tidak diteliti dengan baik, sehingga terjadi pengulangan nama yang menyebabkan ada keluarga yang dianggap mampu kemudian direkomendasikan untuk menerima bantuan tersebut sedangkan tujuan dari bantuan tersebut harusnya diterima oleh para janda atau keluarga miskin.
4. Stuktur Birokrasi dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dari kementerian sosial (Kesos) hingga kebijakan yang telah ditetapkan di desa lewat musyawarah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul wahab, Solichin. 2005. *Analisis kebijaksanaan : formulasi implementasi kebijakan negara*. Bumi Aksara, Jakarta

- Ahadi Nofri. 2004. *Pengantar Manajemen*. Unri Press, Pekanbaru
- Bratakusumah, Deddy Supriady. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gilarso, T. 1999. *Pengantar Ekonomi Makro*. Kanisius, Yogyakarta
- Hadi, Sutrisno. 1986. *Statistik jilid II*. ANDI. Cetakan XXVIII. Yogyakarta
- Kumorotomo, Wahyudi. 2002. *Etika Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Luthans, Fred. 2006. *Prilaku Organisasi*. Andi Jogjakarta
- Makmur. 2007. *Manajemen Pembangunan (Memadukan ilmu dan praktek)* Jakarta.
- Santoso, Jo et al. 2002. *Sistem perumahan Sosial di Indonesia*. Pusat Studi perkotaan UI dan Ikatan Ahli Perencanaan, Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2005. *Administrasi Pembangunan*. PT Bumi Aksara, Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. PT Bumi Aksara, Jakarta:
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2002. *Kebijakan Dan Manajemen Otonomi Daerah*. Lukman Offse, Yogyakarta
- Riady. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. PT. Raja Grafindo Jakarta.